

**PERAN BABINSA (BINTARA PEMBINA DESA) DALAM PEMBINAAN  
TERITORIAL NON FISIK DI KAMPUNG SUKABUMI KEC.BUAY  
BAHUGA KAB.WAY KANAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**LISA SARTIKA**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PERAN BABINSA (BINTARA PEMBINA DESA) DALAM PEMBINAAN TERITORIAL NON FISIK DI KAMPUNG SUKABUMI KEC.BUAY BAHUGA KAB.WAY KANAN**

**OLEH :**

**LISA SARTIKA**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan peran babinsa dalam pembinaan teritorial non fisik yang dilakukan di kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, kemudian teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran babinsa dalam pembinaan teritorial non fisik meliputi : 1. Babinsa sudah memberikan pembinaan teritorial non fisik dengan baik dan maksimal, namun kurang berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Babinsa karena masyarakatnya kurang berpartisipasi, 2. Kendala yang dihadapi oleh Babinsa yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat, masih tingginya ego setiap individu masyarakat, kesibukan terhadap profesinya masing-masing, serta kurang fahamnya masyarakat terhadap pentingnya vaksin, 3. Solusi dari kendala yang dihadapi oleh Babinsa yaitu: meningkatkan pendekatan terhadap masyarakat, meningkatkan kerjasama dengan aparaturnya Kampung, melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, meningkatkan kerjasama dengan dinas kesehatan, serta mendatangi ke rumah warga yang tidak mau di vaksinasi.

Kata Kunci: Peran, Babinsa, dan Pembinaan Teritorial Non Fisik

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF BABINSA (BINTARA PEBINA VILLAGE) IN NON-PHYSICAL TERRITORIAL DEVELOPMENT IN SUKABUMI VILLAGE, BUAY BAHUGA KAB.WAY KANAN**

**BY**

**LISA SARTIKA**

This study was conducted with the aim of describing the role of babinsa in non-physical territorial development carried out in Sukabumi Village, Buay Bahuga District, Way Kanan Regency. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach, then data collection techniques in the field are carried out by interviews, observation, and documentation. Based on the results of the study, it shows that the role of Babinsa in non-physical territorial development includes: 1. Babinsa has provided good and maximum non-physical territorial development, but it is not running according to the objectives expected by Babinsa because the community is less participating, 2. Obstacles faced by Babinsa namely: lack of public awareness, still high ego of each individual community, busy with their respective professions, and lack of understanding of the community about the importance of vaccines, 3. Solutions to the obstacles faced by Babinsa, namely: improving their approach to the community, increasing cooperation with village officials, carry out continuous socialization, increase cooperation with the health office, and visit the homes of residents who do not want to be vaccinated.

Keywords: Role, Babinsa, and Non-Physical Territorial Development

**PERAN BABINSA (BINTARA PEMBINA DESA) DALAM PEMBINAAN  
TERITORIAL NON FISIK DI KAMPUNG SUKABUMI KEC.BUAY  
BAHUGA KAB.WAY KANAN**

Oleh

**LISA SARTIKA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi

: **PERAN BABINSA (BINTARA PEMBINA DESA)  
DALAM PEMBINAAN TERITORIAL NON  
FISIK DI KAMPUNG SUKABUMI KEC.BUAY  
BAHUGA KAB.WAY KANAN**

Nama Mahasiswa

: **Lisa Sartika**

NPM

: **1813032007**

Program Studi

: **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan

: **Pendidikan IPS**

Fakultas

: **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing I,

**Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd**  
NIP 19870602 200812 2 001

Pembimbing II,

**Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.**  
NIK 231601840309101

**2. Mengetahui**

Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial

**Drs. Tedi Rusman, M.Si.**  
NIP 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi  
Pendidikan PKn

**Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19870602 200812 2 001



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd**



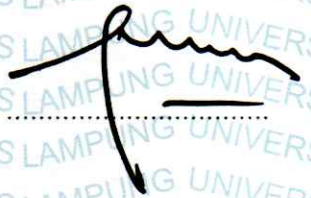
Sekretaris

: **Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.**



Penguji  
Bukan Pembimbing

: **Drs. Berchah Pitoewas, M.H**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.**

NIP. 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **08 Juni 2022**

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Lisa Sartika

Nomor Pokok Mahasiswa : 1813032007

Fakultas Jurusan : FKIP/ Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebut daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Bandar Lampung, 08 Juni 2022



Lisa Sartika

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Lisa Sartika merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Sarjono dan Kasiati yang lahir pada tanggal 04 September 1999 di Sukabumi, Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Penulis pernah mengikuti pendidikan formal di SDN 2 Sukabumi dari tahun 2007 hingga 2012, melanjutkan ke tingkat Mts di Mts Bumiharjo dari tahun 2012 hingga tahun 2015, kemudian SMA di SMAN 2 Buay Bahuga dari tahun 2015 sampai 2018, kemudian pada tahun 2018 penulis di terima di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial melalui jalur SNMPTN.

Pada tahun 2018 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti unit kegiatan kemahasiswaan dan diamanahkan menjadi anggota dewan giatop pramuka Universitas Lampung 2019/2020. Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dan Praktik Pengalaman Lapangan (PLP) di SMA Negeri 2 Buay Bahuga.



## **MOTTO**

“When there is a will, there is a way (Ketika ada kemauan, disitu pasti ada jalan)”

**-Mahfuadzot-**

“Jika kau tak mampu menjadi sebatang nyiur yang tegar, jadilah segumpal rumput tetapi mampu memperindah taman”

**-Lisa Sartika-**

## PERSEMBAHAN

**Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan ni'mat kesempatan kupersembahkan karya ini sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan baktiku kepada :**

Kedua orang tua tercinta Ayahanda Sarjono dan Ibunda Kasiati yang selalu menjadi motivasi, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya padaku, yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku.

Kakekku tersayang Miron dan Nenekku tersayang Rasmini yang selalu mendukungku dan mendoakan keberhasilanku. Dan adik-adikku tersayang Bima Taufik Hidayat.

Guruku yang telah mengajarkanku mengenal Tuhan dan Seluruh dosen yang telah dengan sabar membimbing, mendidik dan mengarahkanku hingga berhasil.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) Dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik di Kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. sebagai Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung; sebagai pembimbing akademik dan sebagai pembimbing I terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, dan nasehat dalam

penyelesaian skripsi ini tanpa ada bantuan ibu saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;

7. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., sebagai pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini, tanpa masukan yang membangun dari bapak saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah;
8. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., sebagai pembahas I terima kasih atas saran dan masukannya sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik
9. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd., sebagai pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya sehingga dapat menambah khazanah penulisan skripsi ini menjadi lebih lengkap;
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, serta segala bantuan yang diberikan;
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sarjono dan Ibu Kasiati. Terima kasih atas ketulusan, keikhlasan, kasih sayang dan kesabaran yang diberikan kepadaku, terima kasih telah merawatku dengan penuh keikhlasan dan selalu memberikan motivasi serta doa-doa yang tidak akan pernah terbayarkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat dan senantiasa menjaga orang tuaku tercinta dalam rahmat, keimanan, dan ketaqwaan;
12. Teruntuk adikku Bima Taufik Hidayat terima kasih untuk canda tawa dan do'anya semoga selalu diberikan kesehatan dan dijadikan anak yang sholeh;
13. Keluarga besar Mbah Miron, Om Imam dan keluarga, Om Yanto dan keluarga, yang telah memberikan kasih sayangnya yang tiada batas, mendukung, mendo'akan dan menjadi pelindung bagi penulis yang sangat penulis cintai;



14. Bapak Panggih selaku kepala Desa Sukabumi dan seluruh perangkat Desa Sukabumi yang telah bersedia membantu dalam penulisan skripsi ini, serta mendukung dalam terselesainya skripsi ini;
15. Seluruh anggota Keluarga Besar Pramuka Universitas Lampung yang telah mengajarkan banyak hal terutama dalam kebersamaan, kekeluargaan, serta dalam mengabdikan di masyarakat dan di dunia kampus;
16. Seluruh teman-teman PPKn angkatan 2018, dan teman kosanku Kurnia, Diah, dan Isna semoga kalian semua diberikan keberkahan, kesehatan dan kelancaran atas semua hal;
17. Mba Novi, mba Tri, mba Rizka, mba Nadya, mba Fifi, yang telah membantu dan mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga keberkahan selalu menyertai kalian;
18. Keluarga besar KKN yang luar biasa (Ayu Puspita Sari dan Diah Rahma Dewi ) & Teman PPL SMA N 2 Buay Bahuga (Ajeng Rahayu, Annisa Apriani, dan Ayu Puspita Sari) terima kasih atas segala pengalaman, motivasi dan kenangan dalam belajar secara nyata dan mengabdikan;
19. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu, serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Maret 2022

**Lisa Sartika**  
**1813032007**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.5.2 Manfaat Praktis.....	5
1.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.6.1 Ruang Lingkup Ilmu.....	6
1.6.2 Subyek Penelitian .....	6
1.6.3 Obyek Penelitian.....	6
1.6.4 Wilayah Penelitian.....	6
1.6.5 Waktu Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Deskripsi Teori.....	7
2.2 Tinjauan Umum Tentang Peran .....	7
2.2.1 Definisi Peran .....	7
2.3 Tinjauan Umum Tentang Babinsa .....	8
2.3.1 Pengertian Babinsa .....	8
2.3.2 Tugas Pokok Babinsa .....	9
2.3.3 Peran Babinsa .....	11
2.4 Tinjauan Tentang Pembinaan.....	12
2.4.1 Definisi Pembinaan.....	12
2.5 Tinjauan Tentang Pembinaan Teritorial.....	14
2.5.1 Definisi Pembinaan Teritorial .....	14
2.5.2 Pembinaan Teritorial Non Fisik .....	15
2.6 Penelitian Relevan.....	20
2.6.1 Tingkat Lokal .....	20
2.7 Kerangka Pikir Penelitian.....	22

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	24
3.2 Kehadiran Peneliti .....	25
3.3 Data Dan Sumber Data.....	25
3.3.1 Data Penelitian.....	25
3.3.2 Sumber data .....	25
3.4 Tehnik Pengumpulan Data .....	27
3.4.1 Observasi .....	27
3.4.2 Wawancara .....	28
3.4.3 Dokumentasi.....	29
3.5 Uji Kredibilitas.....	29
3.5.1 Memperpanjang Waktu .....	29
3.5.2 Triangulasi .....	29
3.6 Tehnik Pengolahan Data .....	30
3.6.1 Editing .....	30
3.6.2 Tabulating dan Coding .....	30
3.6.3 Interpretasi Data .....	31
3.7 Tehnik Analisis Data.....	31
3.7.1 Pengumpulan Data.....	31
3.7.2 Reduksi Data ( <i>reduction data</i> ) .....	31
3.7.3 Penyajian Data ( <i>data display</i> ).....	31
3.7.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi ( <i>conclusion drawing/verifying</i> ) .....	32
3.8 Tahap Penelitian .....	32
3.8.1 Pengajuan Judul.....	32
3.8.2 Penelitian Pendahuluan.....	33
3.8.3 Pengajuan Rencana Penelitian.....	33
3.8.4 Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian.....	33
3.8.5 Pelaksanaan Penelitian .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
4.1.1 Sejarah Kampung Sukabumi .....	35
4.1.2 Kondisi Geografis.....	38
4.1.3 Kondisi Demografis.....	39
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian .....	40
4.2.1 Peran Babinsa dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan .....	40
4.2.2 Kendala Peran Babinsa dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan .....	49
4.2.3 Solusi dari Kendala Peran Babinsa dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan .....	59
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	62
4.3.1 Peran Babinsa dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan .....	62

4.3.2 Kendala Peran Babinsa dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan .....	66
4.3.3 Solusi dari Kendala Peran Babinsa dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan .....	72
4.4 Keunikan Hasil Penelitian.....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>76</b>
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Informan Penelitian.....	26
Tabel 1.2 Kepala Kampung Sukabumi dari masa ke masa.....	36
Tabel 3. 1 Luas masing-masing dusun Kampung Sukabumi.....	38
Tabel 4. 1 Komposisi Penduduk Desa Sukabumi.....	39
Tabel 4.2 Data Pekerjaan Masyarakat Kampung Sukabumi.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 2.1 Triangulasi Tehnik Pengumpulan Data.....	30
Gambar 4.1 Komponen Dalam Analisis Data.....	32
Gambar 4.2 Pendidikan dan Pelatihan aparatur kampung.....	44
Gambar 4.3 Sosialisasi vaksin oleh Babinsa.....	46
Gambar 4.4 Sosialisasi vaksin oleh Babinsa.....	46
Gambar 4.5 Babinsa kerjasama dengan tenaga kesehatan.....	48
Gambar 4.6 Kerjasama pembenahan rumah rusak akibat hujan disertai angin.....	49
Gambar 4.7 Kerjasama pembenahan rumah rusak akibat hujan disertai angin.....	49
Gambar 4.8 Kerjasama memperbaiki jalan rusak.....	49
Gambar 4.9 Babinsa menghimbau waspada terhadap pemulung.....	52
Gambar 4.10 Pelaksanaan pembinaan pramuka di SD N 1 BB.....	54
Gambar 4.11 Pelaksanaan pembinaan pramuka di SMPN 1 BB.....	55
Gambar 4.12 Pelaksanaan pembinaan pramuka di SMPN 1 BB.....	55
Gambar 4.13 Pelaksanaan pembinaan pramuka di SMAN 2 BB.....	55
Gambar 4.14 Pelaksanaan pembinaan pramuka di SMAN 2 BB.....	55
Gambar 4.15 Babinsa turun langsung ke rumah warga yang tidak mau di vaksin.....	61
Gambar 4.16 Babinsa turun langsung ke rumah warga yang tidak mau di vaksin.....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Keterangan Pengajuan Judul
2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
3. Lembar Permohonan Seminar Proposal
4. Lembar Perbaikan Seminar Proposal
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Balasan Penelitian
7. Surat Pernyataan Wawancara
8. Instrumen Penelitian Kualitatif (Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi)
9. Hasil Wawancara
10. Hasil Observasi
11. Hasil Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Ketertiban adalah suatu keadaan yang aman, tenang, dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada, Satjipto Rahardjo (2006:55). Sedangkan keamanan adalah kemampuan mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman nyata, Yamin dan Matengkar (2006:6). Ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan segenap bangsa Indonesia.

Ketertiban dan keamanan masyarakat adalah modal utama bagi keselamatan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam konteks ini ketertiban dan keamanan tersebut harus dirawat dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri, serta anggota masyarakat yang lainnya. Dalam konteks tertentu ternyata Tentara Nasional Indonesia bertugas juga dalam membina dan merawat keamanan dan ketertiban ini. Menurut UU No. 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjaga ketertiban dan keamanan negara, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional atau yang disebut dengan pembinaan teritorial non fisik.

Pertahanan negara dapat terwujud apabila setiap warga negara melaksanakan kewajibannya untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan Babinsa sebagai ujung tombak ditengah masyarakat, maka segala gerakan dan manuver yang membahayakan terhadap keutuhan NKRI dapat ditangkal dengan cepat. Melalui metode Bhakti TNI, Bintahwil, dan Binkomsos, Satkowil juga membantu pemerintah



dalam membangun sarana prasarana/ infrastruktur yang menunjang jalannya pembangunan nasional. Babinsa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi pembinaan yang bertugas melatih rakyat, memberikan penyuluhan, serta melakukan pengawasan fasilitas ataupun prasarana pertahanan dan keamanan di desa, Mahardika (2015:3).

Babinsa merupakan pelaksana Danramil dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan bidang hankam dan pengawasan fasilitas serta prasarana pertahanan dan keamanan di pedesaan. Babinsa juga merupakan pelaksana tugas dari Danramil dalam pelaksanaan BINTER (Bimbingan Teritorial) yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap unsur geografi, demografi, serta kondisi sosial untuk dijadikan sebagai ruang, alat, dan kondisi juang guna kepentingan hankam negara. Pada masa Orde Baru, peran Babinsa dalam kehidupan sosial politik masyarakat sangat kuat, khususnya ditingkat desa, TNI saat itu yang masih dibawah lembaga ABRI memiliki peran dwi fungsi yang memungkinkan mereka ikut andil dalam bidang sosial dan politik. Namun, sejak era reformasi peran sosial politik ini dipangkas, TNI hanya menjadi institusi pertahanan negara, yaitu mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar.

Babinsa merupakan kunci utama dalam membaca serta mendeteksi ancaman, gangguan, hambatan, dan rintangan yang dapat merusak sendi-sendi pertahanan dan keamanan negara. Maka dari itu perlunya penguatan pendidikan karakter, pendidikan moral, dan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan dasar yang nantinya bermanfaat, Widodo (2011:11). Hal ini sangat penting untuk keberlangsungan dan masa depan generasi penerus bangsa agar mereka bisa menjaga negaranya dari berbagai ancaman. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, UU No.3 Tahun 2002.

Peran Babinsa mulai berkurang, namun keberadaan Babinsa masih ada hanya saja perannya di masyarakat sudah disesuaikan dengan tuntutan saat ini. Dengan berfungsinya peran Babinsa maka diharapkan akan mampu menciptakan sistem

pertahanan dan keamanan serta ketertiban masyarakat secara terkendali yang bebas dari gangguan. Kenyataannya tugas Babinsa belum optimal, belum optimalnya tugas Babinsa karena untuk sementara waktu ini kegiatan semua kurang berjalan hal ini dikarenakan saat situasi pandemi untuk saat ini Babinsa sedang fokus dalam membantu program dinas kesehatan, jadi belum bisa menyesuaikan dengan tugas babinsa itu sendiri. Babinsa hanya berfokus dalam kegiatan dinas kesehatan. Hal ini dibuktikan ketika peneliti melakukan penelitian pendahuluan, peneliti menemukan bahwa kurang berjalannya kegiatan siskamling, dimana siskamling merupakan salah satu bentuk kegiatan bela negara yang dimana siskamling ini adalah bertujuan untuk menjaga pertahanan dan keamanan serta ketertiban lingkungan setempat dengan cara ronda keliling lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa siskamling merupakan kegiatan upaya bela negara serta pertahanan dan keamanan negara, seluruh rakyat punya hak yang sama, tidak dibedakan miskin dan kaya, pejabat atau bukan saat kegiatan siskamling semua warga ikut berpartisipasi.

Siskamling merupakan perwujudan nyata nilai-nilai sila pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat. Selain itu ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Selain itu ditegaskan dalam Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sejauh ini yang dilakukan oleh Babinsa Desa Sukabumi dalam menegakkan Siskamling itu sendiri, Babinsa bekerja sama dengan aparat desa seperti, Kepala Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Hansip untuk menegakkan siskamling ini sendiri. Mengingat karena wilayah kerja yang luas sehingga Babinsa bekerja sama dengan aparat desa. Tentunya Babinsa juga memberikan arahan jika ada orang tidak dikenal atau orang asing masyarakat diminta untuk segera dapat melapor sesuai prosedur untuk di tindak lanjuti, sehingga bisa segera diatasi sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam hal ini dibutuhkanannya peran Babinsa dalam pembinaan teritorial diharapkan akan mampu menciptakan sistem pertahanan dan keamanan serta ketertiban di masyarakat secara terkendali yang bebas dari gangguan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Peran Babinsa (Bintara

Pembina Desa) Dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik di Kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

### **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ini berfokus pada Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) Dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik Di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

- a. Bagaimana peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam pembinaan teritorial non fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan?
- b. Faktor apa saja yang menjadi kendala peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam pembinaan teritorial non fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan?
- c. Bagaimana solusi dari kendala peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam pembinaan teritorial non fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam pembinaan teritorial non fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan.
- b. Untuk mendeskripsikan kendala peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam pembinaan teritorial non fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan.
- c. Untuk mendeskripsikan solusi dari kendala peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam pembinaan teritorial non fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan serta memperluas wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan bagi setiap warga negara Indonesia serta untuk pendidikan di Indonesia terutama dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Bagi Peneliti, dapat menambah informasi pengetahuan dan kemampuan berfikir serta menambah wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan.
- b. Bagi Lembaga Pendidikan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan referensi untuk meningkatkan pengetahuan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disekolah, dalam menciptakan ketertiban dan keamanan, pentingnya pertahanan negara, dan ketahanan nasional bangsa Indonesia.
- c. Bagi Masyarakat, agar lebih memahami tentang pentingnya peran Babinsa dalam pembinaan teritorial non fisik yang sudah menjadi kewajiban sebagai Bintara Pembina Desa guna mempertahankan persatuan dan kesatuan negara.



## **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.6.1 Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan politik dan kenegaraan khususnya dalam kawasan pendidikan politik dan kenegaraan dengan tema yang membahas tentang Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) Dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik di Kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

### **1.6.2 Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah Babinsa, Kepala Kampung, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Masyarakat Kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

### **1.6.3 Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) Dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik di Kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

### **1.6.4 Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Sukabumi, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan.

### **1.6.5 Waktu Penelitian**

Pelaksanaan penelitian secara resmi dilakukan setelah peneliti mendapatkan izin untuk mengumpulkan data dilapangan, dengan surat izin penelitian nomor 1019/UN26.13/PN.01.00/2022 dari Dekan FKIP Universitas Lampung pada 22 Februari 2022.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Deskripsi Teori**

Deskripsi teori berisikan tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan diteliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian.

#### **2.2 Tinjauan Umum Tentang Peran**

##### **2.2.1 Definisi Peran**

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting bagi sebagian orang. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, Soekanto (2007:243). Peran dapat didefinisikan sebagai keteraturan perilaku yang diharapkan dari individu, Supardi (2011:88). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran, Suyanto dan Narwoko (2007:158).

Menurut Riyadi (2002) memaparkan bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (norma-

norma, harapan, tanggung jawab, dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga dapat memengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan atau diperankan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Berdasarkan menurut pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Babinsa**

### **2.3.1 Pengertian Babinsa**

Babinsa adalah pelaksanaan DANRAMIL dalam melaksanakan fungsi pembinaan teritorial di pedesaan yang bertugas pokok melatih rakyat dan memberikan penyuluhan di bidang pertahanan negara serta pengawasan fasilitas atau prasarana untuk pertahanan negara di pedesaan. Konsep Babinsa merupakan kepanjangan dari Bintara Pembina Desa yang berada dibawah Koramil. Babinsa adalah pelaksana pembinaan teritorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa serta dengan segala

permasalahan yang penuh dengan kemajemukan. Oleh karena itu sesuai dengan tekad TNI dalam rangka ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan Nasional yang bertumpu pada pembangunan masyarakat desa, maka Babinsa harus mempunyai kemampuan yang memadai agar dapat memacu masyarakat desanya aktif dalam pembangunan Babinsa dituntut memiliki kondisi mental, motivasi yang tangguh (nilai juang), tingkat profesionalisme yang memadai dan kemampuan yang dapat diandalkan, Saputra (2003:54).

Babinsa wajib memiliki kemampuan teritorial dalam melaksanakan tugas pokoknya, untuk memberikan latihan dasar dalam menjaga teritorial maka diadakan Depo pendidikan bela negara yang berfungsi untuk pendidikan pembekalan teritorial bagi prajurit yang diarahkan ke Satkowil (Satuan komando wilayah). Pembekalan pembinaan teritorial adalah suatu keharusan karena pembinaan teritorial telah menjadi fungsi utama TNI AD, agar kualitas SDM satuan teritorial sebagai ujung tombak selalu handal dan memiliki kemampuan cakap dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Babinsa adalah unsur pelaksanaan Koramil yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah pedesaan atau kelurahan, kemampuan Babinsa sangat menentukan keberhasilan pembinaan teritorial sehingga didalam melaksanakan tugasnya, Babinsa selalu berkordinasi dengan aparat terkait di desa atau kelurahan tempat wilayah binaannya.

### **2.3.2 Tugas Pokok Babinsa**

Sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 34 tahun 2004, tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Undang-Undang RI No.3 Tahun 2002 Pasal 7 ayat 2 tentang pertahanan negara menyebutkan bahwa system

pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Tugas Babinsa tercantum di Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 19/IV/2008 Tanggal 08 April 2008, yaitu:

1. Melaksanakan pembinaan territorial sesuai dengan petunjuk Danramil
2. Melaksanakan pengumpulan dan pemeliharaan data geografi, demografi, kondisi sosial dan Potensi Nasional meliputi SDM/SDA/SDB serta sarana dan prasarana di wilayahnya
3. Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi wilayah bagi pasukan yang bertugas di wilayahnya
4. Melaporkan perkembangan situasi kepada Danramil pada kesempatan pertama
5. Babinsa dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Danramil.

Bimbingan territorial juga mencakup pembinaan kesadaran bela negara dan cinta tanah air melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan jati diri bangsa Indonesia. Bimbingan territorial juga berfungsi menanamkan jiwa semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam membela negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pembinaan tentang kemandirian TNI-rakyat melalui pemahaman jati diri TNI, dilakukan kegiatan Bhakti TNI dan pembinaan perlawanan Rakyat (Wanra) didaerahnya dalam rangka untuk menciptakan ketahanan dan keamanan wilayah dari gangguan-gangguan yang mengancam keamanan bangsa Indonesia.

Artinya Babinsa ini memiliki tugas dan tanggung jawab penuh terhadap desa binaannya, dimana selain membina desa binaannya Babinsa juga harus mengerti semua yang berkaitan dengan desa binaannya, mulai dari kondisi geografinya, demografi, kondisi sosial, potensi nasional meliputi Sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana yang ada di



wilayah desa binaannya tersebut. Selain itu Babinsa juga melaksanakan bimbingan teritorial yaitu meliputi kesadaran bela negara, dalam pembinaan kesadaran bela negara ini Babinsa wajib menanamkan kepada seluruh warga desa binaannya.

### **2.3.3 Peran Babinsa**

Didalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial, Babinsa memiliki peran terhadap pembinaan dan penanaman bela negara kepada masyarakat di desa binaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pada Bab IV tentang peran, fungsi, dan tugas TNI. Strategi implementasi pelaksanaan pendidikan kesadaran bela negara mencakup beberapa strategi, yaitu :

#### **1. Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari penyelenggaraan pembinaan teritorial yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan wilayah dengan cara memberikan pendidikan dengan komunikasi sosial kepada masyarakat secara langsung dengan cara meningkatkan kepekaan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah setiap ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan yang dapat membahayakan keutuhan negara. Pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh bintara Pembina desa dengan maksud agar pembinaan kesadaran bela negara dapat dipahami oleh masyarakat berjalan dengan baik. Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan proses sistematis untuk meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk siswa didik untuk mempelajari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), kemampuan (ability) atau perilaku terhadap tujuan pribadi dan organisasi sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Artinya pendidikan dan latihan ini adalah salah satu bentuk pembinaan teritorial yang bertujuan untuk menjaga ketahanan wilayah yang dimana dilakukan dengan cara pendidikan melalui komunikasi secara langsung dengan seluruh masyarakat guna meningkatkan kesadaran, kepekaan, dan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan dan hambatan serta tantangan yang mengancam ketahanan negara. Dalam hal ini

dilakukan langsung oleh Babinsa agar dalam pembinaan kesadaran bela negara ini dapat dipahami secara langsung oleh masyarakat

## **2. Sosialisasi**

Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, dilaksanakan dalam bentuk diskusi, dialog, dan komunikasi dua arah. Komunikasi sosial dalam bentuk sosialisasi bertujuan untuk mewujudkan keeratn hubungan dengan segenap komponen bangsa dan juga sebagai penyampaian kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan peran, fungsi, dan tugas TNI AD dalam membantu pemerintah untuk menciptakan pertahanan negara dan untuk menanamkan sikap perilaku yang baik sejak dini dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga dapat terbentuk sifat rasa nasionalisme dan bela negara.

## **3. Kerjasama**

Bhakti TNI merupakan perwujudan dharma bhakti TNI sebagai alat pertahanan negara dengan mendayagunakan kemampuan TNI, dilaksanakan bersama-sama instansi pemerintah terkait dan komponen bangsa lainnya dalam rangka tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu membantu pemerintah dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai dengan system pertahanan semesta, serta membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sosial di daerah, Wibowo Rizki (2017:8).

## **2.4 Tinjauan Tentang Pembinaan**

### **2.4.1 Definisi Pembinaan**

Menurut Thoha (1989) Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1.pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan ; 2.pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Jadi pembinaan merupakan faktor terpenting untuk mencapai keberhasilan. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup

tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pengertian pembinaan menurut psikologi pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

Pembinaan menurut Masdar Helmi (1973) adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidaktercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental. Disini peran pembinaan ini sangat diperlukan guna me-refresh kondisi psikis dan mental seseorang agar kembali agar tidak mengalami depresi, dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan tadi dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah usaha yang direncanakan dan dilaksanakan guna memperoleh peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas secara teratur dan terarah terhadap sumber daya manusia yang berkaitan langsung dibidangnya.

## **2.5 Tinjauan Tentang Pembinaan Teritorial**

### **2.5.1 Definisi Pembinaan Teritorial**

Menurut Adiwijoyo (2002) Doktrin teritorial nusantara menyebutkan bahwa pembinaan diartikan sebagai tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan arti kata dari teritorial adalah bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara dengan batas-batas tertentu. Kemudian secara luas, teritorial berarti sebagian dari permukaan bumi, terdiri atas daratan, perairan, dan ruang udara dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh suatu negara sebagai wilayah nasional. Dengan demikian sudah tersimpul unsur ruang semesta negara dengan segenap isinya (sosiogeografis), baik yang merupakan daya kekuatan maupun daya kemampuan, baik kekurangannya maupun kelemahannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, baik yang bersifat materiil maupun spiritual.

Dari kedua pengertian tersebut, sesuai dengan Buku Pedoman Praktis Aparat Teritorial, yang dimaksud dengan Pembinaan Teritorial adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, pengerahan, serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap aspeknya dalam rangka menjadikan kekuatan wilayah sebagai RAK (Ruang, Alat, dan Kondisi) Juang guna kepentingan pertahanan negara yang hakekatnya untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI dan Rakyat guna menyukseskan tugas pokok TNI. Pembinaan teritorial dapat dilaksanakan oleh TNI secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan unsur diluar TNI untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya Kemanunggalan TNI dan Rakyat.

Pembinaan teritorial pada hakekatnya merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan dan ketetapan-ketetapan yang mengatur tentang hak pembelaan negara serta sistem pertahanan dan keamanan negara (Sishankamneg) yang menjadi fungsi dan peran TNI AD. Pembinaan teritorial bercirikan kewilayahan, kerakyatan, dan kesemestaan, sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh komponen bangsa. Wujud pembinaan teritorial merupakan suatu sistem pembinaan yang digali dari pengalaman bersenjata untuk menegakkan keutuhan negara, dengan berpegang teguh pada konstitusi yakni Pancasila dan UUD 1945.

Dalam perjuangan TNI, pembinaan teritorial telah teruji aktivitasnya untuk menangkal berbagai peristiwa nasional maupun sektoral yang bercorak kewilayahan sehingga dapat digunakan sebagai upaya untuk mengelola potensi kewilayahan. Konsep pembinaan teritorial dalam mengelola kekuatan pertahanan di daerah yang dikembangkan TNI pada saat ini berbeda dengan konsep lama (Hankamrata), menyeluruh (*total defence*). Dalam konsep Hankamrata, rakyat menjadi “pagar manusia” dibidang pertahanan dan keamanan (Hankam). Sementara dalam *total defence*, rakyat diberi pelatihan dan keahlian, sehingga dapat menjadi kekuatan pendukung pertahanan negara, Widjojo (2007:135).

### **2.5.2 Pembinaan Teritorial Non Fisik**

Pembinaan teritorial non fisik adalah pembinaan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia kepada masyarakat di wilayah binaannya yang dilakukan secara langsung dengan cara memberikan materi, seperti penyuluhan, pembinaan pramuka, tentang TNI, dan lainnya. Artinya dalam hal ini yang dimaksud dengan pembinaan teritorial non fisik ini adalah pembinaan yang bersifat materi. Adapun yang termasuk ke dalam pembinaan teritorial non fisik yaitu :

#### **a. Penyuluhan**

Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi terciptanya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya, Subejo (2010). Penyuluhan menurut

Gondoyoewono adalah suatu penerangan yang menekankan pada suatu objek tertentu dan hasil yang diharapkan adalah suatu perubahan perilaku individu atau sekelompok orang. Sebagai proses komunikasi, penyuluhan berarti proses dimana seseorang individu (komunikator) menyampaikan lambing-lambang tertentu, biasanya berbentuk verbal untuk mempengaruhi tingkah laku komunikan, yang artinya penyuluhan boleh ditujukan untuk kegiatan mempengaruhi orang lain, Nofalia (2011).

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksud dengan penyuluhan adalah suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penyuluhan juga merupakan salah satu kegiatan mendidik kepada masyarakat guna memberikan pengetahuan, informasi, dan kemampuan baru, agar mereka dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang lebih baik lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Adapun bentuk penyuluhan yang dilakukan Babinsa dalam hal ini ada 2 yaitu penyuluhan tentang ketertiban dan keamanan;

#### 1.) Ketertiban

Dalam kamus istilah hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum, Efendi dkk (2016:188). Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur, menurut aturan, rapi. Sedangkan ketertiban yaitu, peraturan (di masyarakat dan sebagainya) atau keadaan serba teratur baik. Menurut kamus hukum, tertib adalah ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan” atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan” dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib secara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan

peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik, Gautama (2009:30).

Menurut S.Gautama (2009) ketertiban ini sebagai “rem darurat” yang kita temukan pada setiap kereta api. Pemakaiannya harus secara hati-hati dan seirmit mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka kereta api tidak akan berjalan dengan baik. Ia melanjutkan bahwa lembaga ketertiban ini digunakan jika pemakaiannya dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat berat daripada sendi-sendi asasi hukum nasional hakim. Maka dalam hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja (2002) ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakkan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ketertiban adalah suatu keadaan yang aman, tenang, dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

## 2.) Keamanan

Secara etimologis konsep keamanan (*security*) berasal dari bahasa latin “*securus*” yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan. Keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman nyata, Yamin dan Matengkar (2006:6). Kemudian yang dimaksud dengan gangguan keamanan adalah gangguan dan ancaman yang muncul akibat dari kondisi yang pada umumnya tidak teratur, tidak disiplin, demokrasi yang tidak terkendali, pertentangan idiologi (*clash of civilization*), dominasi kekuatan politik tertentu, peredaran senjata gelap, globalisasi, instabilitas politik dan pemberontakan terhadap dominasi negara-negara lain, diantaranya adalah terorisme, separatisme, konflik horizontal, dan pemberontakan senjata, Liota (2002:473)

Hakikatnya keamanan negara yang mencakup keselamatan individu dalam ketertiban umum harus disusun berdasarkan kondisi obyektif domestik dengan memperhatikan konteks strategis regional dan global. Di dalam negeri, keselamatan warga dan ketertiban publik akan diharapkan pada kejahatan konvensional berupa tindakan kriminalitas seperti, pencurian, perampokan, tawuran, pemerkosaan, pencopetan dan sebagainya. Selain itu aparat keamanan juga akan dihadapkan pada masalah ancaman dalam negeri seperti, huru-hara (akibat tidak puasny masyarakat terhadap pemerintah), pengamanan obyek vital (akibat maraknya berbagai aksi *reclaiming* masyarakat), konflik komunal, terorisme, serta tribalisme, Liota (2002:488).

Keamanan negara diselenggarakan oleh pemerintah melalui usaha system keamanan negara yang diselenggarakan oleh beragam institusi keamanan yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang spesifik. Pengelolaan keamanan negara perlu membedakan antara institusi-institusi penanggung jawab politik dan penanggung jawab operasional. Intitusi penanggung



jawab politik adalah pemerintah dan parlemen yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan keamanan dan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan, A.A Bayu Perwira (2006:7). Keamanan negara adalah bentuk pendekatan keamanan yang diberlakukan penguasa negara terhadap masyarakat secara umum, M.Busyro Muqoddas (2011:9).

Disisi lain menurut Beni dkk (2009) menyatakan keamanan negara adalah pemberhentian terakhir dari tujuan negara yang terus bergelut dalam menghadapi kekuatan di luar dirinya. Kekuatan di luar dirinya bisa berarti kekuatan luar negeri tapi juga kekuatan yang merongrong di dalam negeri. Institusi-institusi atau operasional meliputi TNI, POLRI, Komunitas Intelijen negara, kejaksaan agung, bea cukai, imigrasi, dan jenis khusus kepolisian lainnya seperti polisi hutan dan polisi pamong praja. Mengenai hubungan antara institusi-institusi tersebut bersifat koordinatif dan didasarkan pada kompetensi dan spesialisasi. Sistem keamanan negara ini meliputi mekanisme peringatan dini, perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta kemampuan penegakkan hukum.

Adapun fungsi keamanan negara adalah untuk mewujudkan eksistensi atau kelangsungan hidup dan ketentraman masyarakat dimana wewenangnya berada pada pemerintah pusat, namun penyelenggaraannya harus mempertimbangkan perubahan prinsip penyelenggaraan pemerintah negara yang bersifat desentralistik kecuali kewenangan di bidang yustisi dan penegakkan hukum. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keamanan adalah suatu usaha untuk menghindari timbulnya atau adanya ancaman kejahatan yang akan mengganggu. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap peretas, keamanan rumah terhadap maling dan penyusup lainnya, keamanan finansial

terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi yang berhubungan dengan keamanan yang lainnya.

b. Pembinaan Pramuka

Pembinaan pramuka merupakan kegiatan yang dilakukan Babinsa di wilayah binaannya terutama sekolah yang ada di wilayah binaannya dengan cara memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan, kecenderungan atau keinginan, serta kemampuan peserta didik sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif, sehingga bisa menjadi pelopor dan bisa menjadi mandiri.

c. Tentang TNI

Yang dimaksud dengan tentang TNI ini adalah Babinsa melakukan penyuluhan kepada kaum muda tentang bagaimana cara atau memberikan motivasi, masukan, saran, serta sekaligus mengajak untuk mereka mendaftar TNI dan bisa menjadi bagian dari anggota Tentara Nasional Indonesia tentu tidak dengan tidak ada unsur paksaan melainkan dengan ajakan.

## **2.6 Penelitian Relevan**

### **2.6.1 Tingkat Lokal**

1). Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wibowo, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan judul “Pembinaan Teritorial Desa Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1.) Penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dilaksanakan menggunakan 3 metode, yaitu Bhakti TNI, Bintangwil, dan Binkomsos. 2.)

Dalam menyelenggarakan Pembinaan Teritorial desa di wilayah binaan, terutama di Kecamatan Balai Jaya, Koramil 08/Bagan Sinembah beserta para Babinsa dihadapkan pada beberapa hambatan, diantaranya adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, jumlah personil dengan luas wilayah binaan yang tidak sebanding, tingkat kesejahteraan Babinsa yang belum terpenuhi, komponen diluar TNI yang belum sepenuhnya paham terhadap penyelenggaraan Pembinaan Teritorial TNI AD, dan pengaruh globalisasi dan perkembangan zaman, yang menyebabkan penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, masih belum optimal.

Persamaan dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai pembinaan teritorial, dan terdapat perbedaan dalam subjek kajian penelitian dan objek kajian penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wibowo objek penelitiannya yaitu, Pembinaan Teritorial Desa Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. Sedangkan objek yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) Dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik di Desa Sukabumi Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan.

2). Penelitian yang dilakukan oleh Fathul Kamal, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Di Kecamatan Meukek” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian ini adalah Koramil, Ketua Babinsa, Aparatur desa, serta Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dan model interaktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa, 1) pelaksanaan tugas Babinsa dapat dirangkum dalam pembinaan potensi geografi, demografi dan potensi sosial ekonomi. 2)

adapun upaya untuk mengatasi masalah ketertiban dan keamanan masyarakat Meukek adalah mengajak masyarakat atau aparat desa untuk mengadakan siskamling, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga membantu masyarakat sewaktu-waktu dibutuhkan misalnya ada kemalingan, banjir, kebakaran, dll atau bisa juga mendapat laporan saat tengah malam dan sering melaksanakan patrol bersama polsek setempat.

Persamaan dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai ketertiban dan keamanan, dan terdapat perbedaan dalam subjek kajian penelitian dan objek kajian penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fathul Kamal objek penelitiannya yaitu, Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Di Kecamatan Meukek. Sedangkan objek yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) Dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik di Desa Sukabumi Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan.

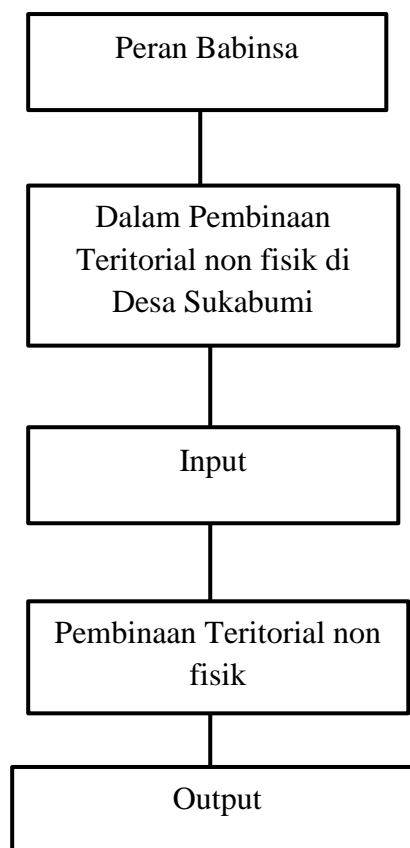
## **2.7 Kerangka Pikir Penelitian**

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, dihadapkan pada permasalahan teritorial yang bersifat spesifik, permasalahan teritorial tersebut tentunya akan berpotensi mengancam ketahanan nasional. Dalam rangka menjaga integritas wilayah NKRI, serta dalam upaya mengatasi permasalahan teritorial yang muncul di wilayah negara Indonesia. TNI menggunakan pendekatan spesifik melalui suatu prosedur “*geostrategi*” yang baik, salah satunya adalah pembinaan teritorial. Dilihat dari perkembangannya, Pembinaan Teritorial merupakan proses institusionalisasi dari strategi militer yang menempatkan perang gerilya sebagai strategi utamanya. Proses institusionalisasi strategi perang gerilya yang sebenarnya bersifat tentatif ini bergeser menjadi bagian permanen dari strategi pertahanan nasional sejak pengadopsian Doktrin Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta).

Babinsa merupakan kunci utama dalam membaca serta mendeteksi ancaman, gangguan, hambatan, dan rintangan yang dapat merusak sendi-sendi pertahanan

dan keamanan negara. Babinsa merupakan pelaksana Danramil dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugass pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan bidang hankam dan pengawasan fasilitas serta prasarana pertahanan dan keamanan di pedesaan. Babinsa juga merupakan pelaksana tugas dari Danramil dalam pelaksanaan BINTER (Bimbingan Teritorial) yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap unsur geografi, demografi, serta kondisi sosial untuk dijadikan sebagai ruang, alat, dan kondisi juang guna kepentingan hankam negara.

**Gambar 1.2 Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif karena peneliti akan memberikan pemahaman mengenai gambaran dari informasi yang diperoleh, bukan mengukur data yang didapat. Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini peneliti juga akan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memperjelas fenomena yang ada dengan menunjukkan dalam bentuk pemaparan kata-kata dan dokumentasi, serta bukan angka. Sugiono (2013:8) memaparkan bahwa metode kualitatif juga merupakan metode artistik, karena proses penelitian lebih artistik (dengan pola yang lebih sedikit), sehingga disebut dengan metode eksplanatori, karena data dalam hasil penelitian lebih banyak melibatkan interpretasi metode. Metode penelitian kualitatif disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*). Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mendapati data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4)

Penelitian kualitatif ini digunakan untuk menengetahui interaksi sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Interaksi sosial tersebut akan dijelaskan oleh peneliti dengan cara melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dengan pengumpulan dokumentasi agar dijumpai pola-pola hubungan interaksi sosial yang jelas. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan tepat dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti karena sasaran dan kajiannya yaitu mendeskripsikan peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) pembinaan teritorial non fisik di Desa Sukabumi Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan, peneliti akan menganalisis dan memaparkan temuan yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

### **3.2 Kehadiran Peneliti**

Moleong (2010) memaparkan dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif hal yang menjadikan keunikan dalam penelitiannya yaitu pentingnya kehadiran peneliti dalam proses penelitian. Sebagai alat pengumpul data utama peneliti dapat melakukan analisis dan menyimpulkan data yang ditemukan atas temuannya di lapangan, sehingga kunci utama dari keberhasilan penelitian jenis kualitatif adalah peneliti itu sendiri.

### **3.3 Data Dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Data Penelitian**

Penelitian kualitatif menggunakan data penelitian berbasis kata-kata atau berbentuk verbal bukan angka, untuk mendapatkan data kualitatif Moleong (2010:6). Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa data kualitatif menghasilkan data-data yang bisa berbentuk kata, kalimat, serta gambar. Dalam penelitian ini yang menjadi data penelitian yaitu, peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam pembinaan teritorial non fisik.

#### **3.3.2 Sumber data**

##### **3.3.2.1 Sumber Data Manusia**

Penelitian kualitatif di dalam memperoleh sumber data, penelitian kualitatif mengenal orang yang memberikan sumber informasi sebagai informan, didalam penentuan informan peneliti akan menggunakan tehnik bola salju (*Snowballing sampling*). Tehnik bola salju adalah sumber data dipilih orang yang memiliki kemampuan dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti sehingga mampu menemukan pintu kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data, Sugiyono (2013:300). Dalam penelitian kualitatif juga mengenal unit analisis, yaitu satuan analisis yang digunakan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah Babinsa, Kepala Kampung. RW. RT. Dan Masyarakat Kampung Sukabumi.

Dari unti analisis tersebut, Babinsa, Kepala Kampung. RW. RT. Dan Masyarakat Kampung Sukabumi akan menjadi informan kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dalam penelitian yang akan diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi yang paling menonjol. Sedangkan Babinsa, Kepala Kampung. RW. RT. Dan Masyarakat Kampung Sukabumi, komentar peneliti, dan sumber-sumber yang lainnya berupa arsip, buku-buku yang mendukung penelitian akan menjadi informan pendukung, dengan demikian harapannya informan pendukung akan mendukung sumber dari informan kunci. Tehnik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali sumber informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

**Tabel 1.1 Informan Penelitian**

No	Sumber Data	Kode	Jumlah
1	Babinsa Kampung Sukabumi	BK	1
2	Kepala Kampung Sukabumi	KK	1
3	Rukun Warga Kampung Sukabumi	RW	1
4	Rukun Tetangga Kampung Sukabumi	RT	1
5	Masyarakat Kampung Sukabumi	MK	1
Jumlah			5

Setelah menemukan informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini maka untuk mempermudah dalam hal pengolahan dan pengumpulan data diperlukan pemberian kode pada informan yang ada Miles Huberman (2014:20). Pemberian kode sangat diperlukan untuk mempermudah pelacakan data secara bolak-balik. Maka berdasarkan pendapat tersebut jelas kode yang



telah diberikan pada informan sebagai sumber data yang dirasa sangatlah penting dalam penelitian ini.

### **3.3.2.2 Sumber Data Non Manusia**

Sumber data non manusia ini adalah berupa dokumen-dokumen dan dokumentasi, serta pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) Dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik di Kampung Sukabumi Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan.

## **3.4 Tehnik Pengumpulan Data**

### **3.4.1 Observasi**

Observasi adalah tehnik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Tujuannya agar informasi yang diberikan oleh informan dengan yang diterima peneliti ada kesamaan persepsi. Tehnik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, Sutopo (2006:75). Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi, Arikunto (2006:229).

Menurut Spradley (1980) mengemukakan bahwa, tahapan observasi ada tiga, yaitu:

#### 1) Observasi Deskriptif

Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajah umum, dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkam, oleh karena itu hasil dari observasi ini disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata. Observasi tahap ini

sering disebut sebagai *grand tour observation*, dan peneliti menghasilkan kesimpulan pertama.

#### 2) Observasi Terfokus

Pada tahap ini peneliti sudah melakukan *mint tour observation*, yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Bila dilihat dari segi analisis data, maka pada tahap ini peneliti telah melakukan analisis taksonomi, yang selanjutnya menghasilkan kesimpulan kedua.

#### 3) Observasi Terseleksi

Pada tahap ini peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Dengan melakukan analisis komponensial terhadap fokus, maka pada tahap ini peneliti telah menemukan karakteristik, kontras-kontras atau perbedaan dan persamaan antar kategori, serta menemukan hubungan antar satu kategori dengan kategori yang lain. Pada tahap ini diharapkan peneliti telah dapat menemukan pemahaman yang mendalam atau hipotesis.

### 3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu, Esterberg (dalam Sugiyono,2013:231). Tehnik pengambilan wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dengan informan. Penelitian ini akan menggunakan tehnik wawancara dengan jenis wawancara terstruktur (Structured interview), jenis wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Sanapiah Faisal (1990) mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

#### 1) Menetapkan kepada siapa wawancara ini akan dilakukan

- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara
- 4) Melangsungkan alur wawancara
- 5) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

### **3.4.3 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik, Sukmadinata (2007:222). Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh peneliti, agar memperkuat fakta-fakta tersebut.

## **3.5 Uji Kredibilitas**

Uji kredibilitas (credibility) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, Prastowo (2012:266). Oleh sebab itu, dalam sebuah penelitian agar hasil penelitian tersebut tidak diragukan, maka diperlukan uji kredibilitas dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

### **3.5.1 Memperpanjang Waktu**

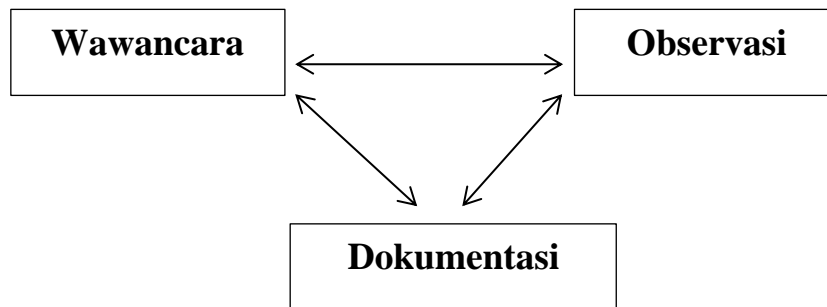
Tahap ini peneliti bisa semakin dekat dengan subjek penelitian agar hubungan antara peneliti dan subjek penelitian bisa menimbulkan sikap saling percaya, sehingga peneliti bisa memperoleh informasi yang terpercaya dan lengkap.

### **3.5.2 Triangulasi**

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain diluar data itu untuk kepentingan dalam pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, Moleong (2010:330). Agar diperoleh kredibilitas data dilakukan cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya

untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik triangulasi ini merupakan jenis triangulasi teknik.

**Gambar 2.1 Triangulasi Tehnik Pengumpulan Data**



### **3.6 Tehnik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperlukan cukup, langkah selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan cara sebagai berikut :

#### **3.6.1 Editing**

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan sesudah penulis menghuimpun data di lapangan. Tahap editing merupakan tahap mengecek kembali data yang diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan atau validitas untuk kemudian dipersiapkan ke tahan selanjutnya.

#### **3.6.2 Tabulating dan Coding**

Tahap tabulasi adalah tahap pengelompokan jawaban-jawaban yang seragam dan tertera serta sistematis. Pada tahap tabulasi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pengelompokan data-data yang sama. Kemudian data yang sudah diperoleh dari lapangan disusun dalam bentuk tabel selanjutnya diberi kode.

### **3.6.3 Interpretasi Data**

Interpretasi data adalah tahap untuk memberikan pengertian atau penjelasan dari data yang ada pada tabel untuk kemudian dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dokumentasi yang ada.

## **3.7 Tehnik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif meliputi tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif diantaranya yaitu: 1.) Reduksi data (data reduction); 2.) Paparan data (data display); dan 3.) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying) Miles & Huberman (2014:103).

### **3.7.1 Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat diolah peneliti.

### **3.7.2 Reduksi Data (*reduction data*)**

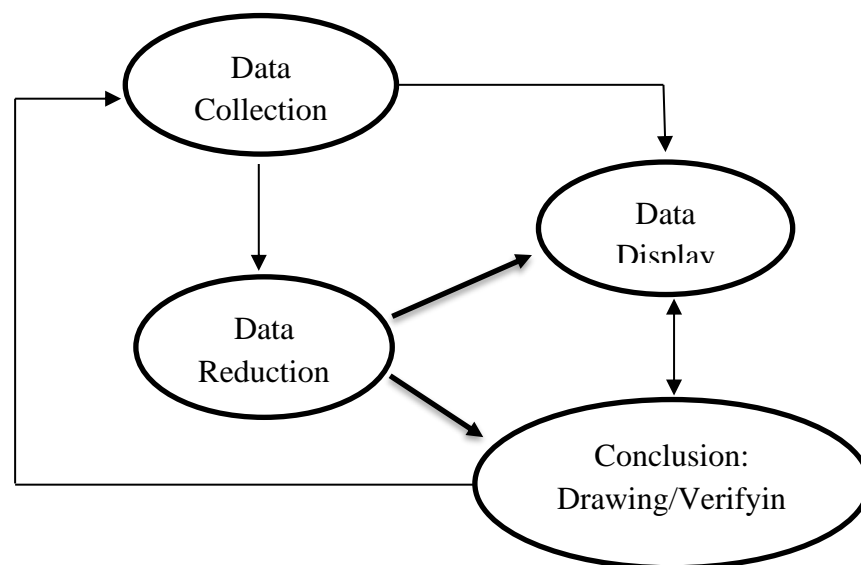
Menurut Miles & Huberman (2014) Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang sapat mempertajam, mengklasifikasikan atau mengelompokkan, mengorientasikan data akhir, menghapus data yang tidak diperlukan, dan mengaturnya sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Oleh sebab itu peneliti akan menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data yang berhubungan dengan peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam menciptakan ketertiban dan keamanan.

### **3.7.3 Penyajian Data (*data display*)**

Penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang dapat menarik kesimpulan dan dalam mengambil tindakan, Prastowo (2012:244). Dengan data-data yang sudah kita dapat, kita akan memahami apa yang terjadi serta apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman kita tentang sajian data tersebut.

### 3.7.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Tahap terakhir yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Oleh sebab itu, proses akhir dalam analisis data memaksa peneliti untuk dapat mendeskripsikan objek penelitian secara jelas untuk menarik kesimpulan yang kredibel, Gunawan (2013:212).



**Gambar 4.1** Komponen dalam analisis data

## 3.8 Tahap Penelitian

### 3.8.1 Pengajuan Judul

Dalam proses pengajuan judul ini peneliti terlebih dahulu melakukan diskusi secara virtual dengan Pembimbing Akademik terkait dengan topik yang akan dibahas pada penelitian, kemudian setelah itu Pembimbing Akademik memberikan masukan terkait judul yang akan diajukan. Selanjutnya setelah mendapatkan judul yang sesuai peneliti kemudian mengajukan judul tersebut ke Program Studi, kemudian pada tanggal 27 September 2021 judul penelitian disetujui oleh Kepala Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan dengan pembimbing

Utama Yunisca Nurmalisa,S.Pd.,M.Pd., serta Pembimbing Pembantu Edi Siswanto,S.Pd.,M.Pd.

### **3.8.2 Penelitian Pendahuluan**

Penelitian pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penelitian serta keadaan atau kondisi tempat penelitian, dengan harapan setelah melaksanakan Penelitian Pendahuluan di Kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan peneliti mendapatkan gambaran umum mengenai lokasi dan juga masalah yang akan diangkat dalam penelitian hal ini bertujuan agar peneliti dapat menyusun proposal penelitian yang didukung oleh beberapa literasi dan arahan dari dosen pembimbing.

### **3.8.3 Pengajuan Rencana Penelitian**

Tahap pengajuan rencana penelitian ini dapat dilaksanakan setelah melakukan konsultasi dan perbaikan Proposal Skripsi oleh pembimbing utama dan pembimbing pembantu. Rencana penelitian ini diajukan oleh peneliti untuk melaksanakan seminar proposal, setelah proposal dinyatakan layak untuk melaksanakan penelitian maka peneliti kemudian akan melanjutkan ke pembuatan pedoman penelitian.

### **3.8.4 Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian**

Penyusunan kisi serta pedoman penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan informasi dari informan yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Tidak hanya itu saja dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi serta data-data yang dibutuhkan. Adapun langkah yang perlu ditempuh peneliti dalam menyusun kisi dan pedoman penelitian ini adalah :

1. Menentukan tema berdasarkan fokus penelitian yaitu, peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam pembinaan teritorial
2. Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan tema dan indikator yang telah ditentukan yaitu tentang pembinaan teritorial.

3. Membuat kisi-kisi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diajukan kepada Babinsa (Bintara Pembina Desa). Setelah mendapatkan persetujuan peneliti dapat melaksanakan penelitian

### **3.8.5 Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penelitian ini akan dilakukan di Kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dengan menggunakan tehnik pengumpulan data diantaranya yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan penulis berkaitan dengan, Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam pembinaan teritorial non fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan maka dapat disimpulkan bahwa, Babinsa di Kampung sukabumi tersebut sudah berperan dengan baik dalam proses pelaksanaan pembinaan teritorial non fisik, hanya saja masyarakatnya yang kurang antusias dan kurang berpartisipasi, sehingga menjadikan kendala atau hambatan bagi babinsa dalam proses pelaksanaan pembinaan teritorial non fisik ini. Sehingga ada beberapa program dalam pembinaan teritorial non fisik kurang berjalan, seperti ronda malam, gotong roryong, dan vaksinasi. Walaupun babinsa sudah memberikan pembinaan teritorial non fisik ini secara baik dan maksimal.

Kendala atau hambatan Babinsa dalam pembinaan teritorial non fisik ini diantaranya yaitu sebagai berikut : kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakatnya, kurangnya kekompakan antar masyarakat, dan masih tingginya ego setiap masyarakat, serta kurang fahamnya masyarakat terhadap pentingnya vaksin.

Solusi dari kendala atau hambatan Babinsa dalam pembinaan teritorial non fisik tersebut, agar proses pelaksanaan pembinaan teritorial non fisik bisa mencapai tujuan sesuai yang diharapkan oleh Babinsa. Adapun solusinya diantaranya yaitu sebagai berikut: melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi secara terus menerus atau berkesinambungan, meningkatkan kerjasama dengan aparaturnya kampung, meningkatkan kerjasama dengan dinas kesehatan dalam menangani masyarakat yang susah untuk melaksanakan vaksin, dan turun langsung ke rumah warga yang tidak mau di vaksin.

## 5.2 Saran

Setelah melaksanakan penelitian tentang peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam pembinaan teritorial non fisik di Kampung Sukabumi Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti, antara lain:

1. Bagi Babinsa diharapkan bisa lebih melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya, selain itu juga perlunya melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, agar terus terjalinnya silaturahmi yang kuat kepada masyarakat. Agar masyarakat bisa lebih mudah untuk diajak bekerjasama dalam proses pelaksanaan pembinaan teritorial non fisik, sehingga bisa tercapainya tujuan sesuai dengan yang diharapkan oleh Babinsa itu sendiri.
2. Bagi Masyarakat diharapkan bisa untuk lebih antusias dan berpartisipasi dengan aktif dalam mengikuti proses pelaksanaan pembinaan teritorial non fisik yang dilakukan oleh Babinsa agar tercapainya desa yang damai, nyaman, dan sejahtera, serta lebih maju.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijoyo. Suwarno. 2002. *Preventive Defense:Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Swadana Bangun Dinamika Dunia.
- Anak Agung Bayu Perwira,*Mencari Format Komprehensif Pertahanan dan Keamanan Negara*, (Jakarta:Propatria Institute,2006),
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bakry, Noor Ms. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Beni Sukandis, Eric Hendra dan Aleksius Jemadu, *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Jakarta:Lespressi dan DCAF,2009
- Beni Sukandis, Eric Hendra dan Aleksius Jemadu, *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Jakarta:Lespressi dan DCAF,2009
- Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Babinsa*. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer IV Diponegoro,2003.
- E.Mulyana, *Implemntasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013.
- Faisal, Sanapiah: *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*; YA3 Malang,1990.
- Gunawan,I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif :Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu Sp.2012.*Manajemen SDM*.Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas.Jakarta: Bumi Aksara
- Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, KENCANA, 2016).
- Liota P.H,2002, *Boomerang Effect:The Convergen of National and Human Security*, Dalam Security Dialogue, Vol 33 No.4, dalam Tim Propatria Institute,*Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, (Jakarta:2006).
- M.Busyro Muqoddas,*Hegemoni Rezim Intelijen*,(Yogyakarta:PUSHAM UII, Cetakan Pertama,2011).

- Masdar Helmi.1973 *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, Hlm.35. Semarang: Toha Putra.
- Miles,M.B., dan Huberman,A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung, 2002.
- Moleong,L.J.2010. *Metode Penelian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Yamin dan Sebastian Matengkar, *Intelijen Indonesia Towards Profesional Intelligence*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2006).
- Muhammad Yamin dan Sebastian Matengkar, *Intelijen Indonesia Towards Profesional Intelligence*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2006),
- Nofalia, M, 2011, 'BAB II Pengertian Tujuan Penyuluhan', Universitas Sumatera Utara
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasisi Kurikulum*,Grasindo,Jakarta,2002.
- Prastowo,A.2012.*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.  
Jogjakarta : Ar-ruzzmedia.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta,1991.
- Redaksi Kawan Pustaka,*UUD 48 & Perubahannya Susunan Kabinet RI Lengkap (1945-2014)*. Jakarta:PT. Kawan Pustaka,2004.
- Republik Indonesia.1982.*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982.Tentang Pokok-Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI*.
- Republik Indonesia.2002.*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.Tentang Pertahanan*
- Republik Indonesia.2004.*Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.tentang Tentara Nasional Indonesia*
- RI . 2002 . UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- RI . 2004. UU No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*
- S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009).
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI PRESS. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007.*Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Subejo. (2010) .*Penyuluhan Pertanian Terjemahan Dari Agriculture. Extention (edisi 2)*. Jakarta

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, N.S. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakary.
- Supardi. 2011. *Penelitian Tindakan Kelas (Classrom Action research) Beserta sistematika Proposal dan Laporrannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprpto, dkk. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X SMA/MA 1*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sutopo H.B., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret,
- Suyanto, Bagong & Narwoko, Dwi. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Kencana.
- Thoha, Miftah. (1989). *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa Dan Interval*, hlm.7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wibowo R. 2017. Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), pp.1-15.
- Wibowo. (2012). *Manajemen Kinerja*, hlm.91. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada
- Widjojo, A. 2007. *Komando Teritorial dalam Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta : Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia.